

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keputusan Pemerintah Pusat tentang penyerahan kebijakan – kebijakan baik bidang ekonomi, hankam, sosbud, agama, dll kepada pemerintah daerah atau yang dikenal dengan istilah otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan kebijakan – kebijakan yang tepat bagi daerahnya masing – masing, dengan alasan pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan situasi daerahnya masing – masing. Seperti dalam bidang ekonomi pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap – tiap daerah. Tak terkecuali Propinsi Jawa Tengah yang berusaha melaksanakan kewenangan yang diberikan agar dapat mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah dalam segala aspek. Hal ini terlihat dari usaha Pemerintah Semarang dalam menarik investor agar mau menanamkan modalnya di wilayah Jawa Tengah, seperti diadakannya kegiatan SPA (Semarang Pesona Asia). Propinsi Jawa Tengah khususnya kota Semarang memiliki potensi – potensi yang menarik investor dalam bidang industri hal ini terlihat dari banyaknya industri yang ada di wilayah kota Semarang.

Seperti di wilayah BWK X yang memang diperuntukan untuk kegiatan perindustrian, banyak industri yang didirikan untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar dan Jawa Tengah pada umumnya. Dan untuk wilayah Kecamatan Tugu terdapat beberapa kawasan industri yaitu Kawasan Industri Guna Mekar Industri dan Kawasan Industri Wijayakusuma, dalam kawasan industri ini terdapat berbagai macam industri. Seperti furniture, garment, elektronik, pengolaha kayu, bahan kimia, makanan dan minuman dan juga kawasan ini berfungsi sebagai gudang penyimpanan produk.

SDM yang dibutuhkan oleh industri yang ada dapat menyerap tenaga kerja siap pakai yang ada di wilayah Kecamatan Tugu maupun dari daerah lain semisal Cirebon, Pemalang, Pekalongan, Demak, Salatiga, Cilacap, dll. Dan dari pihak pemerintah juga telah membuat aturan mengenai pendirian sebuah Kawasan Industri yang memerlukan dukungan perumahan bagi pekerjanya.¹⁾

¹⁾Permen Perumahan Rakyat RI No.16/PERMEN/M/2006, diakses tanggal 11 Mei 2008

Meskipun persentase untuk kapling perumahan tersebut berbeda – beda bergantung dari luas lahan yang akan diolah oleh Pengembang Kawasan Industri. Dan untuk Kawasan Industri Wijayakusuma ini, memiliki lahan total ±250 Ha sehingga persentase kisaran untuk kapling perumahan sebesar 10% - 25 % dan kapling untuk area komersial sebesar 17,5%.²⁾

Lokasi dari Kawasan Industri Wijayakusuma ini berada pada BWK X. Pengembangan perumahan yang menunjang kegiatan fungsi industri bertujuan menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja industri yang efisien dan produktif.²⁾

Karena lahan pada sebuah kawasan industri memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dalam pelaksanaannya asrama ini terbangun vertikal. Yang menjadi tanggung jawab pihak developer kawasan industri yaitu sebuah hunian yang menampung pekerja dalam kawasan industri, maka hunian yang sesuai adalah yang berbentuk asrama.

Pemerintah juga menggalakkan pembangunan hunian sewa untuk mengefisieni waktu dan biaya transportasi, hal ini terlihat dengan pengalokasian anggaran pembangunan rumah susun sewa untuk perguruan tinggi dan para pekerja di tahun 2008 mencapai 44 *twin block* dengan lokasi tersebar di seluruh Indonesia.³⁾

Dan untuk kondisi sebuah asrama yang berpenghuni para pekerja yang berada di lokasi kawasan industri maka penekanan desain arsitektur post modern dirasa cocok, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan sifat lahan yang ada di kawasan industri yang komersil sehingga setiap konsep desain asrama harus memiliki fungsi dan, dan fungsi dari bangunan ini adalah hunian sehingga perlu penyesuaian hunian yang humanis, hal ini sesuai dengan falsafah arsitektur post modern yaitu *form and function are equal*.

²⁾ Kep. Menperindag RI No. 50/MPP/Kep/2/1997, diakses tanggal 11 Mei 2008

³⁾ <http://www.kemenpera.go.id>, diakses tanggal 12 Mei 2008

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Menyusun sebuah landasan program perencanaan dan perancangan yang diperlukan dalam pembangunan Asrama Pekerja di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma Kota Semarang, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan non fisik asrama yang akan dibangun. Sehingga Asrama Pekerja menjadi sebuah hunian yang nyaman bagi para pekerja untuk beraktivitas dan beristirahat setelah bekerja.

2.2 Tujuan

Menjadikan Asrama Pekerja menjadi hunian yang layak dan murah bagi para pekerja pabrik di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, yang menghususkan untuk menerima penghuni yang berstatus lajang (belum berkeluarga) baik pria maupun wanita. Dengan adanya Asrama Pekerja ini diharapkan kinerja para pekerja meningkat dan menumbuhkan loyalitas terhadap pabrik tempat mereka bekerja.

3. Lingkup Pembahasan

Lingkup bahasan yang tercakup dalam Program Perencanaan dan Perancangan ini secara garis besar dibagi menjadi :

1. Ruang lingkup substansional

Substansi yang dibahas mencakup semua teori mengenai asrama dan kawasan industri; teori, dan metode pendekatan; yang relevan untuk mendukung penyusunan program perencanaan dan perancangan Asrama Pekerja di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma Kota Semarang.

2. Ruang lingkup spasial

Lingkup spasial yang dibahas mencakup regional Kota Semarang, dan Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma dari sudut pandang cakupan area pekerja yang ingin ditampung ke dalam hunian serta sebagai lokasi kawasan perencanaan dan perancangan.

Lingkup spasial di luar cakupan di atas, hanya dibatasi pada objek-objek yang digunakan sebagai studi pembandingan.

4. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisa melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang digunakan dalam penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan.

1). Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- studi literatur, untuk memperoleh teori-teori serta regulasi yang relevan.
- observasi lapangan, untuk memperoleh data mengenai lokasi perencanaan dan perancangan, serta data studi banding.
- wawancara pihak terkait, dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, guna melengkapi data-data yang diperoleh dari studi literatur dan observasi lapangan.

2). Analisa dilakukan dengan cara :

- Mengkaji dari data – data yang telah didapat berupa studi regulasi, studi literatur dan studi banding, untuk mendapatkan pengertian sebuah asrama pekerja yang ideal.

5. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar urutan pembahasan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
 mengungkapkan latar belakang, maksud dan tujuan, dan sistematika pembahasan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka : Asrama Pekerja dan Kawasan Industri
 menjelaskan tentang tinjauan umum asrama dan tinjauan kawasan industri,
- Bab III. Tinjauan Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma Kota Semarang
 Meliputi tinjauan profile Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, pekerja yang ada di kawasan industri ini, serta kebijakan pemerintah dalam penyediaan permukiman di kawasan industri
- Bab IV. Studi Banding

Berisi data-data mengenai hasil studi banding yang telah dilakukan, meliputi sistem menghuni, aktivitas, fasilitas dan kondisi fisik. Yang mengacu pada kondisi sebuah asrama di kawasan industri yang terwujud pada *Dormitory* di Kawasan Industri Suryacipta di Karawang. Dan kondisi pekerja yang ada di lapangan di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma Kota Semarang terwujud dalam Pondok Boro (Kos – Kosan) di area sekitar KITW. Serta melihat kondisi penginapan bagi para pekerja yang berada di wilayah suburban di Kota Woinheime yang terwujud dalam sebuah Hostel.

Bab V. Kesimpulan Batasan dan Anggapan

berisi kesimpulan, batasan dan anggapan sebagai hasil penguraian dari bab-bab sebelumnya.

Bab VI. Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan

merupakan analisa pendekatan program perencanaan dan perancangan yang mencakup titik tolak pendekatan, pendekatan aspek fungsional, arsitektural. kontekstual, pendekatan konsep perancangan.

BAB VII. Konsep dan Program Dasar Perancangan Arsitektur

membahas rumusan konsep dan program dasar perancangan arsitektur berupa konsep dasar perencanaan, konsep dasar perancangan, dan program dasar perancangan.